



Negosiasi Partai Islam pada Pilkada Kab. Tanah Datar 2024-2029 serta Keterkaitannya dengan Tafsir Surat An-Naml Ayat 36

Mahmuda

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
mahmuda@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

The 2024-2029 Tanah Datar Regency Pilkada becomes an important moment for political parties, especially Islamic parties, to demonstrate their influence and strategies in gaining public support. In this context, the negotiation between the Islamic party and its endorsed candidate becomes crucial and draws attention among the people of the Tanah Datar region. The purpose of this research is to analyze the dynamics of negotiating support from Islamic parties in the context of regional elections. The method used is qualitative analysis with a case study approach. Data were obtained through interviews with party officials, regional head candidates, and political observers. The research results show that support negotiations are based on ideological considerations, mass base, and local interests. Islamic parties tend to choose candidates who align with religious values and have popularity among voters. In addition, coalition strategy is also an important aspect in strengthening the bargaining position of the party in negotiations. In this finding, it can be concluded that the negotiation of support for the Islamic party not only involves political aspects but also the social and cultural aspects of the local community.

Keywords: Political Interpretation, Islamic Party Coalition, Tanah Datar Regional Election

Abstrak

Pilkada Kabupaten Tanah Datar periode 2024-2029 menjadi momen penting bagi partai politik, khususnya partai Islam, untuk menunjukkan pengaruh dan strategi mereka dalam meraih dukungan publik. Dalam konteks ini, negosiasi antara partai Islam dan calon yang diusungnya menjadi krusial dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat wilayah Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika negosiasi dukungan partai Islam dalam konteks Pilkada. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai, calon kepala daerah, serta pengamat politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dukungan didasarkan pada pertimbangan ideologis, basis massa, dan kepentingan lokal. Partai Islam cenderung memilih calon yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan memiliki popularitas di kalangan pemilih. Selain itu, strategi koalisi juga menjadi aspek penting dalam memperkuat posisi tawar-menawar partai dalam negosiasi. Pada temuan ini dapat disimpulkan bahwa, negosiasi dukungan partai Islam tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: Tafsir Politik, Koalisi Partai Islam, Pilkada Tanah Datar

PENDAHULUAN

Pandangan Umum Tentang Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian terhadap suatu masalah., dalam negosiasi, masing-masing pihak mengemukakan kepentingan, kebutuhan, dan posisi mereka untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. (fitria 2008). Proses ini sering melibatkan tawar-menawar, kompromi, dan pengambilan keputusan bersama. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, politik, hukum, dan hubungan pribadi. Sejumlah aktivitas negosiasi, misalnya, dalam proses penggabungan kepentingan politik mulai dari membuat kebijakan, koalisi, fusi, aliansi hingga konfederasi, memerlukan negosiasi. Begitupun saat konflik, misalnya, saat konflik perbatasan sebuah negara, maka salah satu penyelesaian kasus seperti ini adalah melalui negosiasi. (Kuswarno 2019).

Di dalam Kamus KBBI dinyatakan “Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012). Negosiasi berasal dari kata *to negotiate, to be negotiating* dalam bahasa Inggris yang berarti “merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan atau menawar.

Ciri Khas Negosiasi

Menurut para tokoh, negosiasi memiliki ciri khas di antaranya meliputi: a) Interaksi antara Pihak: Terjadi komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. b) Kepentingan Berbeda: Setiap pihak biasanya memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. c) Dalam teori tradisi sosio-kultural sebuah pergerakan dalam sosiologi, berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. (Griffin 2012), d) Proses yang Dinamis: Negosiasi bisa berubah seiring dengan perkembangan diskusi dan penemuan solusi baru. e) Kesepakatan Akhir: Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak. (Bazerman 2007), dan f) Negosiasi dalam Islam merupakan bagian penting dari interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks Islam, negosiasi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menghormati. (Syani 2020).

Negosiasi menurut Pandangan Al-Qur`an dan Hadis

Surah Al-Baqarah (2:282)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...﴾
(البقرة/٢: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang, maka hendaklah kamu menuliskannya... dan hendaklah di antara kamu ada saksi yang adil..."

Surah Al-Hujurat (49:11)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ...﴾ (الحجرات/٤٩: ١١)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain..."

Hadis terkait Negosiasi

Di antara hadis yang relevan dalam masalah negosiasi adalah:

Pertama; Hadis Riwayat Ahmad: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain; ia tidak boleh menzalimi saudaranya, dan tidak boleh membiarkannya terzalimi." (Katimin 2018)

Kedua; Hadis Riwayat. Al-Bukhari. "Jika kalian menolak untuk tidak duduk-duduk di sana, maka tunaikanlah hak jalan." Mereka berkata, "Apakah hak jalan itu?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran..(Sirajuddin 2018)

Prinsip Negosiasi dalam Islam

Islam telah menetapkan beberapa prinsip dalam negosiasi, yaitu: a) Kejujuran: Selalu jujur dalam bernegosiasi. (Fadillah 2022) b) Keadilan: Memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil. c) Sikap Sabar: Dalam proses

negosiasi, kesabaran sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang baik. (Syani 2020), dan d) Saling Menghormati: Menghargai pandangan dan kepentingan pihak lain. (Abdillah 2017)

Asal-Usul Sejarah Partai-Partai Islam di Indonesia

Sejarah partai-partai Islam di Indonesia memiliki akar yang dalam dan berkembang seiring dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. (Junaidi 2023) Tipe policy influencer (Partai yang mempengaruhi) dimana tujuan mereka adalah menerjemahkan tuntutan –tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis. (William. 2003)

Berikut adalah beberapa sejarah partai-partai Islam di Indonesia: (a) Awal Abad 20: Munculnya organisasi Islam modern, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926), yang mengedepankan pendidikan dan sosial keagamaan. Kedua organisasi ini menjadi cikal bakal partai politik Islam di Indonesia. (Basyaruddin. 2016: 73), (b) Partai Masyumi: Didirikan pada tahun 1945, Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) menjadi partai politik utama yang mewakili kepentingan Islam di Indonesia. Partai ini memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan pasca-kemerdekaan, tetapi dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. (hasan 2012), (c) Era Orde Baru: Selama Orde Baru (1966-1998), partai-partai Islam dibatasi. Namun, beberapa organisasi, seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dibentuk pada tahun 1973 sebagai wadah bagi partai-partai Islam yang ada. sebelum dan sesudah orde baru, terdapat kecenderungan para pemimpin muslim untuk terlibat dalam kancah perpolitikan Islam. (Zainuddin 2018); (d) Reformasi 1998: Setelah jatuhnya Orde Baru, banyak partai baru bermunculan, termasuk partai-partai Islam. Beberapa partai yang signifikan antara lain PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional), yang muncul sebagai kekuatan baru dalam politik Islam. (hasan 2012); (e) Pemilu dan Konsolidasi: Partai-partai Islam terus berjuang untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu. Meski mengalami tantangan, mereka tetap menjadi bagian penting dari lanskap politik Indonesia, dengan pendekatan yang bervariasi dari konservatif hingga progresif. (Ayang 2016); dan (f) Perkembangan Terkini: Di era modern, partai-partai Islam berusaha untuk menyesuaikan diri dengan isu-isu kontemporer, termasuk hak asasi manusia, demokrasi, dan ekonomi, sembari tetap mempertahankan identitas ke-Islaman mereka. Sejarah partai-partai Islam di Indonesia adalah gambaran kompleks dari interaksi antara agama, politik, dan masyarakat, yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. (Ihza 1999)

Pada penelitian kali ini penulis sangat menekankan adanya situasi yang sangat urgensi dalam pengangkatan judul di atas Sekilas tentang isu pilkada Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengangkat tema ini karena berkaitan dengan peranan partai politik Islam di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim dalam kaitannya mendukung salah satu pasangan calon tersebut.

Adapun tujuan pada penelitian ini diantaranya: 1) Melihat peranan Partai Islam di kabupaten Tanah Datar dalam mendukung Pasangan Calon Bupati Tanah Datar periode 2024-2029; 2) mengetahui partai-partai Islam yang ikut berkoalisi di Pilkada daerah tersebut. dan 3) Bentuk negosiasi yang dilakukan partai Islam dalam mendukung Pasangan Calon Bupati Tanah Datar periode 2024-2029

Pada riset penelitian kali ini penulis ingin menekankan pada tingkat dan peranan partai politik Islam yang selama ini sudah lama berdiri dan menjadi bahagian

dari pesta demokrasi di setiap pergelaran pemilu. Penulis ingin mencari data yang realita di lapangan terhadap situasi dilapangan yang multi kompleks akan peranan partai dalam hal dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Peneliti menganggap bahwa isu yang diangkat sangatlah berbeda dengan peneliti dimana peneliti lebih tertuju ke partai agamis, dengan konsep negosiasi kaitannya dengan al-Qur`an dan hadis. Sedangkan terdahulu yang lebih condong ke peranan partai berideologi nasionalis yang banyak membahas tentang strategi pemenangan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian mengenai negosiasi partai Islam dalam hal dukungan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tanah Datar periode 2024-2029, peneliti mencoba melakukan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

Studi Kasus

Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam lima tradisi penelitian kualitatif yang diantaranya fokus pada biografi, fenomenologi, fokus suatu teori dasar, fokus etnograf, dan fokus studi kasus. (Cresswell 1998). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan studi kasus dari partai-partai Islam yang di Tanah Datar dan analisis bagaimana mereka melakukan negosiasi untuk mendapatkan dukungan. Kemudian mengumpulkan data dari dokumen resmi, berita, dan wawancara dengan anggota partai yang ikut pada pelaksanaan negosiasi dalam hal dukungan Pasangan calon kepala daerah kab. Tanah Datar. Pada penelitian kali ini peneliti menganggap bahwa kasus yang diangkat adalah kasus yang sedang berlangsung dan tentu menjadi perhatian serius bagi peneliti untuk menjadikannya sebagai bahan peneliti.

Kajian Observasi Perkembangan

Metode Penelitian Perkembangan Metode penelitian perkembangan adalah sifat penelitian yang ingin mengetahui alur urutan dan perubahan sebagai fungsi waktu. (Syafri 2021). Metode ini digunakan yakni peneliti ikut serta dalam acara-acara politik, diskusi, atau kampanye yang dilaksanakan oleh partai partai Islam maupun partai nasionalis yang ada di wilayah kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Peneliti melihat keterlibatan baik media cetak amupun media elektronik berupa Online dan flatform media sosial lainnya dalam hal dukuungan terhadap pasangan calon tersebut di kab Tanah Datar sangat penting adanya karena informasi bisa langsung didapat dengan adanya berita dari media tersebut. Kemudian studi Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman seseorang, cara mengalami sesuatu, dan makna yang dimiliki dalam sebuah pengalaman. (Kuswarno 2019)

Pendekatan Kualitatif

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif sebagai contoh (wawancara, analisis dokumen) dengan kuantitatif (survei) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Selain itu penelitian kualitatif dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berdasarkan landasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen. (Sugiyono 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis hasil dan pembahasan mengenai negosiasi partai politik Islam dalam hal dukungan terhadap calon kepala daerah setingkat Kabupaten, peneliti menyadari bahwa masalah ini dianggap sangat penting dalam situasi perpolitikan yang ada serta waktu penelitiannya dianggap sangat ideal karena bertepatan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se Indonesia yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Hal ini pula yang menjadi motivasi dan semangat peneliti dalam mengangkat studi kasus di lapangan tersebut, dan menyesuaikan dengan ilmu pengajaran yang ada di Universitas sendiri dalam kontribusinya terhadap Tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian.

Pada penelitian kali ini peneliti melihat bahwa capaian dari objek atau kasus yang dicari adalah paratai-partai Islam yang sudah ada di Indonesia bahkan sudah menjadi bagian dari keikutsertaan partai Islam dalam kontestasi pemilu nasional atau pemilu presiden pada tahun 2024 silam. Dimana terdapat beberapa partai Islam yang lolos seleksi dari KPU nasional. Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang berorientasi pada Islam. Beberapa di antaranya adalah:

(a) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Didirikan oleh Nahdlatul Ulama Didirikan, PKB memiliki basis massa yang kuat di kalangan Nahdliyin. (Ahmad Zahro. 2004 : 54) (b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - Partai ini memiliki sejarah panjang dan berfokus pada penguatan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. PPP merupakan partai Islam yang sudah ada sebelum reformasi, tetapi mengalami perubahan signifikan setelah tahun 1998. PPP berusaha untuk kembali merebut dukungan dengan mengedepankan isu-isu sosial dan ekonomi. (c) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - PKS dikenal dengan pendekatan Islam yang lebih moderat dan progresif, serta aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Dikenal sebelumnya sebagai Partai Keadilan, PKS didirikan pada tahun 1998 dan berkembang pesat dengan dukungan dari kalangan mahasiswa dan aktivis. (d) Partai Bulan Bintang (PBB) - PBB mengusung ideologi Islam dan fokus pada prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan. (e) Partai Amanat Nasional (PAN) - Meskipun lebih bersifat nasionalis, PAN juga mengusung nilai-nilai Islam dalam platformnya. reformis yang dipimpin oleh Amien Rais pada tahun 1998. Partai ini mengusung tema reformasi dan moderasi Islam, menarik banyak pemilih dari kalangan kelas menengah dan aktivis. (f) Partai Gelora : Partai ini memiliki ideologi yang berfokus pada pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pemajuan demokrasi didirikan pada 28 November 2019. Partai Gelora didirikan oleh sekelompok mantan pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa perlu untuk menghadirkan alternatif politik yang lebih inklusif dan modern. Mereka ingin menciptakan platform yang dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda. (g) Partai Ummat : Partai ini didirikan pada tahun 2020 Partai ini berfokus pada prinsip-prinsip Islam dan berupaya untuk menjadi wadah aspirasi umat Islam di Indonesia. Partai Ummat adalah partai politik yang didirikan di Indonesia pada tahun 2020. Partai ini dibentuk oleh mantan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dipimpin oleh Amien Rais, seorang tokoh politik dan intelektual yang dikenal di Indonesia.

Pada proses penelitian ini peneliti menyadari bahwa teori dalam analisa yang peneliti lakukan harus memiliki dasar teori-teori yang relevan dari kasus yang diangkat di lapangan, khususnya dalam hal negosiasi partai-partai politik Islam dalam hal dukungannya terhadap pasangan calon kepala daerah Kab. Tanah Datar periode 2024-2009.

Setelah peneliti yang menganalisa dan mengkaji bahwa penelitian ini sangat relevan sekali dari teori konsep yang disampaikan oleh Max H. Bazerman diantaranya adalah mengenai bahwa: a) *Interaksi antara Pihak*: Terjadi komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat; b) *Kepentingan Berbeda*: Setiap pihak biasanya memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda; c) *Proses yang Dinamis*: Negosiasi bisa berubah seiring dengan perkembangan diskusi dan penemuan solusi baru; dan d) *Kesepakatan Akhir*: Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak.

Pada analisa terori ini peneliti mengagnggap bahwa apa yang disampaikan oleh Max H. Bazerman merupakan bagian yang tidak terlepas dari kaitannya terhadap judul atau masalah ayang diangkat oleh peneliti itu sendiri. Kemudian peneliti juga mengakitkan bahwa analisa dilapangan merupakan bagaian yang tidak terlepas dari pengaruh Islam, yang mana peneliti sendiri menjadi objek temuannya adalah partai-partai politik Islam yang berada di kawasan daerah Kab. Tanah Datar khususnya dan partai Politik Islam secara umumnya yang ada di Indonesia.

Pada tahap penelitian kali ini, peneliti mengkaji dan menelaah arah kebijakan apa yang terajadi dilapangan setelah adanya partai-partai Islam yang siap mendukung dua (2) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Tanah Datar dalam keikutsertaan pasangan calon tersebut pada Pilkada nantinya. Koalisi partai Islam dalam mendukung pasangan calon (paslon) di Pilkada biasanya terbentuk untuk memperkuat posisi politik mereka dan mencapai tujuan bersama. Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya koalisi ini meliputi:

Pertama; *Kepentingan Bersama*: Partai-partai Islam seringkali memiliki visi dan misi yang sejalan, terutama dalam hal isu-isu keagamaan dan sosial. Koalisi memungkinkan mereka untuk memperkuat suara dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Kedua; *Strategi Pemilih*: Dengan berkoalisi, partai-partai ini dapat menjangkau lebih banyak pemilih, terutama dari kalangan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai agama. Ketiga; *Peningkatan Daya Saing*: Dalam menghadapi paslon dari partai lain, koalisi dapat meningkatkan daya saing dan peluang menang. Keempat; *Pembagian Sumber Daya*: Koalisi memungkinkan partai-partai untuk berbagi sumber daya, baik dari segi finansial maupun relawan, sehingga dapat lebih efektif dalam kampanye. Kelima; *Negosiasi Dukungan*: Dalam koalisi, partai-partai dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan jika paslon yang didukung menang. Keenam; Koalisi ini bisa menjadi sangat dinamis, tergantung pada situasi politik dan calon yang diajukan. Seringkali, keberhasilan koalisi juga bergantung pada kemampuan untuk menjaga kesatuan dan mengatasi perbedaan di antara anggota koalisi.

Sebagaimana diketahui bersama Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Pada Pilkada ini, hingga pemungutan suara.masyarakat akan memilih Bupati dan Wakil Bupati. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahapan, termasuk pendaftaran calon, kampanye.

Pemilihan umum Kabupaten Tanah Datar 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Tanah Datar 2024 atau Pilbup Tanah Datar 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tanah Datar periode 2024-2029. Pemilihan Bupati (Pilbup) Tanah Datar tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Bupati petahana Eka Putra dapat mencalonkan diri kembali karena baru menjabat selama satu periode.

Adapun setelah hasil dari Pemilu serentak tahun 2024 silam yakni pemilihan Pilpres, Pileg DPR RI, DPD, DPRD Prov dan Kabupaten /Kota maka di perolehlah hasil Perolehan Sementara pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Tanah Datar terdapat 12 partai politik dengan jumlah 35 Kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

No.	Nama Partai politik	Jumlah kursi	Kategori partai
1	Golkar	5 / 35	Partai Nasionalis
2	Demokrat	4 / 35	Partai Nasionalis
3	Gerindra	4 / 35	Partai Nasionalis
4	PKS	4 / 35	Partai Agamis
5	NasDem	4 / 35	Partai Nasionalis
6	PAN	4 / 35	Partai Agamis
7	PKB	3 / 35	Partai Agamis
8	PPP	3 / 35	Partai Agamis
9	Ummat	2 / 35	Partai Agamis
10	Hanura	1 / 35	Partai Nasionalis
11	PDI-P	1 / 35	Partai Nasionalis
12	GELORA	0/35	Partai Agamis

Setelah dilihat dari data yang ada dari sumber KPU Provinsi Sumatera Barat Khususnya daerah kab Tanah Datar didapati bahwa Partai Islam yang duduk di dewan Legeslatif tingkat Kab/Kota bahwa Partai Islam seperti Partai PKS (4) Kursi, PAN (4), PKB (3), PPP (3), Ummat (2), PBB (0), serta Gelora (0) Kursi. Hal ini menunjukkan partai Islam yang ada di wilayah tersebut tidak semuanya mendapatkan jatah kursi di dewan legeslatif tingkat Kab/Kota.

Dengan demikian untuk melanjutkan ketahap pencalonan atau pengusungan calon kepala daerah setingkat Bupati dan wakil Bupati perlu adanya partai pendukung dalam keikutsertaan pasangan sehingga dapat lampu hijau dari partai pendukung. Apabila diteliti maka, partai Islam yang mendukung 2 Pasangan sangatlah beragam sesuai dengan perjanjian atau juga negosiasi dan kontrak politik yang mereka ajukan kepada partai-partai pendukung, namun perlu digaris bawahi bahwa dalam pilkada Kab Tanah Datar kali ini. Apabila dilihat data yang ada, bahwa partai Islam tidak semuanya mendukung pada satu pasangan calon, melainkan partai Islam pecah kongsi dalam mendukung calonnya masing-masing, dimana paslon nomor urut 1 partai Islam pendukung yakni (PAN, PPP, Ummat), sementara pada Paslon 2 partai Islam pendukung diantaranya (PKS dan PKB).

Pembahasan dalam hal proses negosiasi partai ini cukup lama dikarenakan adanya tarik menarik dalam hal dukungan dan juga kredibilitas atau juga faktor dari

sosok pasangan yang dianggap familiar di daerah dukungan mereka. Namun perlu menjadi perhatian bahwa masyarakat kabupaten Tanah datar yang mayoritas beragama muslim, tidak menjadi tolak ukur keberhasilan partai Islam dalam meraup suara di pemilu tahun 2024 yang lalu, dan juga kurang maksimal dalam mencari calon tunggal dari partai Islam.

Berikut kami cantumkan daftar pasangan calon yang terlibat dalam negosiasi dan telah resmi dalam hal dukungan sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2024-2029.

①	
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
Richi Aprian	Donny Karsont
	
Wakil Bupati Tanah Datar (2021–2024)	Pengusaha dan mantan caleg PAN DPRD Sumbar 2024
Partai Pengusung dan Pendukung NasDem, Golkar, PAN PPP Ummat	

②	
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
Eka Putra	Ahmad Fadly
	
Bupati Tanah Datar (2021–2024)	Calon Wakil Wali Kota Padang Panjang 2018,

**Partai Pengusung dan Pendukung, Demokrat, PDI-P,
Hanura PKS PKB Gerindra**

Pada analisa data yang ada bahwa partai Islam yang duduk di lembaga legeslatif tingkat Kab/Kota tidak semuanya mengusung satu pasangan calon, dengan begitu mereka mencari sesuai dengan kriteria dari partai-partai Islam sebagai pendukung mereka, dan bila dicermati bahawa calon Bupati tidak ada satupun yang keterwakili oleh partai Islam, dimana partai Islam hanya sebagai wakil dalam setiap dukungan mereka. (“https://jdih.kpu.go.id/Data-Provinsi/Sumbar/Data_kepkpud” 2024)

Hal ini selaras dengan kajian yang ada di dalam surat an Naml ayat 36 dinyatakan bahawa:

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ آلِ الْفِرْعَوْنَ إِنَّمَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَنتم بَلِ أَنتم بِهِدِيْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾﴾

(النمل/٣٦:٣٦)

Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiabmu." (“<https://quran.kemenag.go.id/>,” n.d.)

Dalam konteks politik kontemporer, ayat ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Pertama; Kekuatan dan Pengaruh: Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang Allah berikan kepada pemimpin, seperti Nabi Sulaiman, bukanlah tujuan utama. Kekuatan ini harus digunakan untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, dan mendorong orang untuk beriman kepada Allah.

Kedua; Uji dan Penilaian: Pengujian yang dilakukan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dan para utusannya adalah sebuah proses penilaian. Dalam politik modern, pemimpin juga harus diuji dan dinilai oleh rakyatnya. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya, serta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan.

Ketiga; Pilihan yang Tepat: Ratu Balqis, setelah melihat kekuasaan Nabi Sulaiman dan menerima pesan tentang keagungan Allah, memilih untuk beriman dan meninggalkan kesesatan. Ini menjadi contoh bahwa dalam politik, pemimpin dan rakyat harus memilih jalan yang benar dan meninggalkan kesesatan. Pemilihan pemimpin yang adil dan beriman adalah penting untuk membangun negara yang sejahtera.

Artinya bahwa di dalam melakukan segala sesuatu dan mengupayakan segala sesuatunya haruslah didiskusikan dan perlu kesabaran dalam menjalankan amanah yang di perintahkan. Apabila di kaitkan dengan negosiasi dalam keterkaitan Pilkada Kab Tanah Datar di antaranya adalah bahwa setiap partai politik Islam berhak menentukan sikap dan arahnya demi tercapainya visi dan misi yang di inginkan dalam setiap partai pendukung. Mendukung atau mendanai kampanye politik atau calon yang sejalan dengan kepentingan yang diwakili adalah salah satu cara bagi pihak yang berkepentingan untuk memengaruhi proses politik. Dukungan finansial ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses kampanye, memperkuat hubungan dengan pemimpin terpilih, dan secara potensial memengaruhi kebijakan yang akan diambil di masa depan. (Fajar 2019)

Namun ada yang cukup menarik pada proses negosiasi tersebut dimana setelah sah menjadi partai pendukung pada Pemilihan kepala daerah tersebut bahwa partai Islam yang notabenehnya mendapatkan kursi sebanyak 16 dari 35 kursi atau sekitar 45 % dari jumlah ketersediaan kursi di dewan legeslatif tingkat Kabupten tidak memiliki power untuk mencalonkan diri atau bekerja sama dalam mengusung pasangan dari latar belakang partai yang agamis. Hal ini menjadi perhatian peneliti bahwa partai Islam itu hanya sebagai pemain pendamping bukan sebagai aktor utama dalam memilih sosok sebagai kepala daerah yang utama yakni sebagai Bupati di daerah kabupaten Tanah datar sendiri.

Serta tidak semua Partai Politik Islam yang duduk di dewan legeslatif tingkat Kab/Kota yang bersepakat untuk mendukung satu pasangan calon, sehingga partai politik Islam bebas menentukan arah kebijakannya. Menjadi catatan diantaranya adalah bahwa partai politik Islam tidak mampu mengusung dari kadernya atau yang berlatar belakang dari partai Islam yang menjadi calon kepala daerah namun hanya bisa ikut sebagai wakil saja dalam kontestasi perpolitikan yang ada. Hal ini selaras bahwa dalam konteks demokrasi, tidaklah bermaksud membahas dan membicarakan kebebasan individu dari perspektif teologis dimana Islam tidak bisa dipisahkan dalam hal perspektif teologis. (werner 1982).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada proses negosiasi partai-partai Islam dalam mendukung pasangan calon (Paslon) di Pilkada biasanya terbentuk untuk memperkuat posisi politik mereka dan mencapai tujuan bersama, dan menjadi arah politik mereka kedepannya dalam mendukung pasangan calon yang mereka usung untuk menjadi kepala daerah ditingkat Kabupaten Tanah datar itu sendiri. Sejalan dengan itu negosiasi yang dilakukan oleh partai Islam pendukung tentu menjadi kesesuaian dari visi misi kedua pasangan calon yang mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang adil dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Perhatian yang menarik bahwa di daerah Kab Tanah Datar merupakan bagian dari wilayah yang berbasis agamis yakni Islam, namun tidak mampu berbuat banyak dalam mendukung partai Islam menjadi partai besar ataupun pemenang dalam kontestasi pemilu pada tahun 2024. Pembahasan yang terjadi dilapangan adalah kenyataan yang sesungguhnya, dimana partai Islam sebagai partai yang besar dan memiliki sejarah tidak bisa berbuat banyak dalam mengambil keputusan namun hanya bisa menambah dukungan dan ikut dalam negosiasi pencalonan kepala daerah, akan tetapi tidak bisa mencalonkan sosok atau kadernya dari latar partai Islam untuk menjadi bupati, atau hanya bisa dicalonkan sebagai wakil Bupati atau wakil kepala daerah dari daerah tersebut ataupun hanya sebatas sebagai pendukung koalisi saja.

Berpijak pada penelitian ini yang hanya bersifat lokal atau daerah dalam hal membahas negosiasi partai politik Islam dalam hal dukungan terhadap pasangan Pilkada daerah tersebut, maka diharapkan adanya peneliti lanjutan untuk mengkaji dan meneliti secara efektivitas pada kajian loby dan negosiasi dengan metode penelitian yang lebih bervariasi dan objek penelitian yang lebih kompleks.

REFERENSI

- Abdillah, Masykur. (2017). *Negosiasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Partai Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Abdurrahman. (1983). *Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlu Sunnah*. Jakarta: Leppenas.
- Ayang, Yutriza Yakin. (2016). *Islam Moderat*. Jakarta: Kencana. Press.
- Bazerman, Max H. (2007). *Title, Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond*. Uk: Pres Harvard.
- Chow, Anthony. (2014). "Understanding Policy Change: Multiple Streams and National Education Curriculum Policy in Hong Kong" 4.
- Cresswell. (1998). "Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions" 1.
- Fadillah. (2022). *Partai Islam Dan Tantangan Negosiasi Politik Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fajar, Novriansyah, M. (2019). *Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik Untuk Pemenangan Calon Legeslatif Pada Pemilihan Umum*. Lampung: Press Ganeka.
- Fitria, Ayuningtias. (2008). "Tekhnik Lobi Dan Negosisasi." Jakarta.
- Griffin, EM. (2012). *A First Look at Communication Theory*. New York: Mc Graw-Hill.
- Hasan, Asari. (2012). *Modernisasi Islam, Tokoh, Gagasan, Dan Gerakan*. Depok: Kencana.
- "https://jdih.kpu.go.id/Data-Provinsi/Sumbar/Data_kepkpu." 2024.
- "<https://qur'an.kemenag.go.id/>." n.d.
- Ihza. (1999). *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Junaidi, s. (2023). *Aliansi Dan Negosiasi: Kinerja Partai Islam Dalam Pemilu*. Jakarta: Kencana. Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2012. Vol. IV.
- Katimin. (2018). *Hadis Hadis Politik*. Medan: Perdana Publishing.
- . (2018). *Politik Islam Indonesia" Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologi Dalam Sejarah Politik Nasional*. Medan: Perdana Publishing.
- Kuswarno, Engkus. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Roy J, Lewicki. (2012). *Negosiasi*. Jakarta: Salemba.
- Sirajuddin, Aly. (2018). *Pemikiran Politik Islam : Sejarah Praktik Dan Gagasan*. Depok: Rajawali Press.
- Situmorang. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Syafrida, Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: IKAPI.
- Syani, Abdul. (2020). *Politik Dan Negosiasi Dalam Partai Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Werner, Becker. (1982). *De Freiheit Die Wir Meinen*. Zurich: Verlag.
- William., D. Colpin. (2003). *Introduction to Internasional Political*. Colombia: PressUniversiy of Colombia.
- Zainuddin, A. (2018). *Kekuatan Dan Kelemahan Partai Islam Dalam Sistem Politik Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Zeehandelaar. (2012). *The Local Politics of Education Governance: Power and Influence among School Boards, Superintendents, and Teachers' Union*. California: Faculty of the Usc Graduate California.